

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PASAR KEMIS KABUPATEN TANGERANG

Sri Rahayu<sup>1</sup>, Haryanto<sup>2</sup>, Nur Izzati  
Alzaytun<sup>3</sup>

<sup>1), 2), 3)</sup>Sistem Informasi, Universitas Raharja

Sejarah artikel  
Diterima: 01 Maret 2022  
Revised: 07 Juni 2022  
Diterima: 09 Juni 2022

Email: [nur.izzati@raharja.info](mailto:nur.izzati@raharja.info)



### Abstrak

Mitra penelitian ini adalah pemerintahan kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dengan melakukan kegiatan PKM. Permasalahan Mitra adalah tentang pelayanan publik, seperti adanya pengaduan masyarakat tentang ketidakpastian jangka waktu pelayanan, pelayanan yang berlarut-larut, dan memakan waktu lama. Metode yang digunakan dalam PKM ini dikenal dengan PAR atau *Participatory Action Research*. Berdasarkan data yang ada, akan diadakan lokakarya untuk staf kecamatan dan perwakilan dari Delapan desa dan satu kelurahan. Hasil dari kegiatan workshop telah membantu memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam penerapan standar pelayanan publik yang ada, dan peserta dapat mengembangkan standar pelayanan publik yang ada. Sebagai kelanjutan dari inisiatif PKM, peserta workshop akan ditugaskan untuk mengembangkan standar pelayanan publik berdasarkan ketentuan dan kaidah atau prinsip pelayanan publik, dan menerapkannya di berbagai zona kerja.

*Kata kunci: Standar Pelayanan Publik; Participatory Action Research; Pelayanan Publik Kecamatan*

### Abstract

*The partner is the government of the Pasar Kemis sub-district, Tangerang Regency in this PKM activity. Partner problems are about public services, such as public complaints about the uncertainty of the service period, protracted services, and takes a long time. The method used in this PKM is known as PAR or Participatory Action Research. Based on the available data, a workshop will be held for sub-district staff and representatives from eight villages and one kelurahan. The results of the workshop activities have helped provide understanding and knowledge in the application of existing public service standards, and participants were able to develop existing public service standards. As a continuation of the PKM initiative, workshop participants will be assigned to develop public service standards based on the provisions and principles or principles of public service, and apply them in various work zones.*

*Keywords: Public Service Standards; Participatory Action Research; Sub-District Public Services*

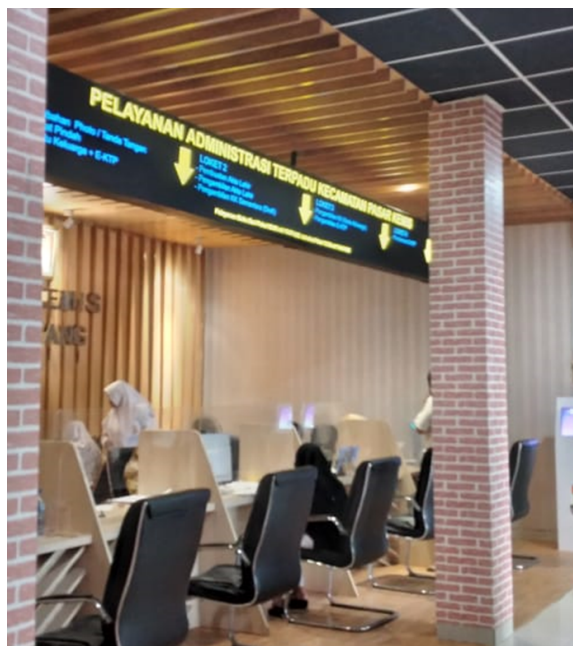
## 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2006, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, pemerintah telah menciptakan *Public Service Excellence Award*, yang mengakui lembaga publik yang unggul dalam semua aspek operasi. Sektor publik berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk menunjukkan bahwa layanannya berpusat pada pelanggan dan bahwa mereka



memberikan peningkatan kinerja yang berkelanjutan [1]. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat pengertian kualitas layanan dan bagaimana penerapannya di sektor publik Mauritius. Teknik SERVQUAL digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki keterputusan antara harapan konsumen secara keseluruhan terhadap suatu layanan dan kesan mereka terhadap layanan tersebut [2]. Penyedia layanan tertentu menerimanya [3]. Perekonomian banyak negara menjadi semakin bergantung pada sektor jasa. Bahkan organisasi sektor publik berada di bawah tekanan untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan meningkatkan. Dalam hal layanan pemerintah dan kriteria kualitasnya, permintaan dan harapan pelanggan berubah [4]. Namun, prosedur kualitas layanan di sektor publik lamban [5], yang diperparah oleh kesulitan dalam mengevaluasi hasil, peningkatan pengawasan publik dan pers, kurangnya diskresi untuk bertindak sewenang-wenang, dan persyaratan bahwa tindakan didasarkan pada undang-undang. Sektor publik telah mengalami sejumlah transformasi sejak kemerdekaan negara pada tahun 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa dekat harapan layanan pelanggan dan pandangan FLE dari harapan pelanggan bertepatan [6]. Metode ini telah sering digunakan untuk mengukur kualitas layanan sektor swasta, tetapi kurang banyak digunakan dalam layanan publik. Berikut ini adalah format makalah ini: Pendahuluan memberikan ringkasan singkat tentang kualitas layanan dan sejarah sektor layanan publik Mauritius [7].

Setelah itu, studi literatur yang relevan tentang kualitas layanan dilakukan. Metodologi makalah studi dibahas, diikuti dengan temuan analisis empiris. Batas dan arah masa depan diperiksa, serta kesimpulan dan konsekuensi manajemen. Akhirnya, berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi dibuat untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor publik [8]. Tidak seperti hal-hal yang sebenarnya, layanan dibuat dan dikonsumsi secara bersamaan oleh klien dan penyedia layanan. Dimasukkannya elemen manusia selama proses pemberian layanan secara signifikan meningkatkan risiko kesalahan staf dan pelanggan. Kesalahan ini disebabkan oleh proses perilaku tidak berwujud yang sulit untuk dipantau dan dikelola. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak penelitian tentang kualitas layanan telah difokuskan pada persepsi pelanggan, relatif sedikit perhatian yang diberikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku karyawan layanan dalam hal memberikan kualitas layanan [9]. Di definisikan pertemuan layanan sebagai interaksi manusia lebih dari dua dekade sebelumnya. Mereka mengklaim bahwa konsumen dan penyedia layanan keduanya memiliki peran untuk dimainkan selama dan mungkin setelah interaksi layanan, dan bahwa peran ini didasarkan pada "interaksi antarpribadi" antara bisnis dan pelanggan [10]. Oleh karena itu, pendapat penyedia layanan dan konsumen layanan secara organik dipengaruhi oleh kualitas layanan di seluruh interaksi layanan [11]. Beberapa telah mengeksplorasi aspek interaktif dari keunggulan layanan dalam pertemuan layanan menggunakan sudut pandang ganda. Pemerintah Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang melaksanakan program PKM ini yang beralamat di Jl. Malino km 12, Borongloe, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang [12].



**Gambar 1. Pelayanan Administrasi Terpadu**

Gambar 1: UKM Mitra PKM Berikut syarat dan ketentuan UKM mitra: a. Di kecamatan ini, sebagian besar kecamatan dan desa belum memiliki Standar Pelayanan Publik. b. tidak terstruktur dan dalam proses pembentukan norma pelayanan publik. c. Masyarakat belum memahami proses pengembangan dan penetapan standar pelayanan publik [13]. d. Di Pemerintah Desa Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang kualitas pelayanan publik masih kurang [14]. Secara khusus dibagi “maladministrasi” menjadi dua puluh kategori, antara lain: Bentuk-bentuk maladministrasi yang dihubungkan dengan Standar Pelayanan Publik membentuk kelompok pertama. Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pasar Kemis dengan ketepatan waktu dalam proses pelayanan publik, yang terdiri dari penundaan yang diperpanjang, non-penanganan [15], dan pengabaian komitmen; Kelompok kedua, yang meliputi konspirasi, kolusi, nepotisme, berperilaku tidak adil, dan benar-benar bertindak tidak adil, adalah jenis maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan dan menghasilkan persepsi ketidakadilan dan prasangka [16]. Kelompok ketiga, yang meliputi pemalsuan [17], pelanggaran hukum, dan perbuatan melawan hukum, merupakan jenis maladministrasi yang lebih mencerminkan bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan [18]. Perbuatan di luar kompetensi, pejabat yang tidak kompeten dalam melakukan intervensi yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan publik merupakan contoh bentuk maladministrasi terkait kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan publik bagi pejabat publik bagi masyarakat [19]. Serta tindakan yang menyimpang dari prosedur standar; kelompok keempat, bentuk-bentuk maladministrasi yang berkaitan dengan kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan pejabat publik kepada masyarakat [20], yang meliputi perbuatan di luar kompetensi [21], pejabat yang tidak mampu menjalankan. Kelompok kelima meliputi tindakan sewenang-wenang, berwibawa, dan tidak patut oleh pejabat publik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat; geng adalah jenis maladministrasi yang mencerminkan korupsi aktif, dan termasuk pemerasan atau permintaan uang, kepemilikan orang lain tanpa izin, dan penggelapan barang bukti.



**Gambar 2. Suasana Salah Satu Pelayanan di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang**

Gambar 2 menggambarkan lingkungan dari salah satu layanan non-standar Distrik. Pelayanan publik meliputi: Pelayanan publik digambarkan sebagai pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat, baik secara umum seperti di museum maupun secara khusus seperti di rumah sakit, seperti dalam makanan restoran. Sedangkan pelayanan publik didefinisikan sebagai berikut: Pelayanan kependudukan memerlukan kepercayaan dari masyarakat umum. Warga berharap agar pelayanan pemerintah memberikan pelayanan yang jujur dan pengelolaan pendapatan yang efektif, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

## 2. METODE PELAKSANAAN

### Desain penelitian

Instrumen SERVQUAL diadopsi untuk mengukur kualitas layanan pelanggan seperti yang ditunjukkan "kesenjangan" antara harapan pelanggan dan persepsi FLE dari pelanggan harapan [22]. Kuesioner survei dengan demikian diberikan kepada dua kelompok responden yang berbeda ini. Masing-masing kelompok memiliki pandangan yang berbeda terhadap kualitas pelayanan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: dari dua bagian: Bagian A berisi pertanyaan tentang profil pribadi responden termasuk jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia. Bagian B mencakup harapan (E) dan persepsi (P) responden menurut menjadi lima dimensi dan ini adalah bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Itu item dalam kuesioner diukur pada skala lima poin mulai dari "1 = sangat tidak setuju" hingga "5" = sangat setuju" dan responden diminta untuk menilai harapan dan persepsi mereka tentang berbagai barang untuk pelayanan publik. Kuesioner yang dikembangkan di uji cobakan oleh 15 pelanggan dan 5 FLE. Dia diamati bahwa responden bingung dengan kata-kata dari beberapa pertanyaan dan dua pertanyaan adalah ulang. Mengingat bahwa instrumen SERVQUAL dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan penelitian tertentu, kata-kata yang diperlukan diubah dan 22 pernyataan dipersingkat menjadi 20. Pertanyaan 5 dan pertanyaan 8, sebagai "janji untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu" dan "menyediakan layanannya pada waktu yang dijanjikan" telah kurang lebih sama artinya, oleh karena itu yang pertama dihilangkan. Juga, pernyataan 18 dan 20, sebagai "individu" dan "pribadi" memiliki arti yang sama, oleh karena itu, pernyataan 18 dihapus [23].

### Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu departemen sektor publik. Fungsi utama dari bahwa departemen publik harus memastikan bahwa undang-undang yang mengatur transportasi jalan ditegakkan untuk mempertahankan kegiatan sosial dan ekonomi negara. Untuk penyediaan layanan dan bagi mereka yang tidak membayar untuk penyediaan layanan [24]. Hal ini ditunjukkan bahwa layanan publik yang membebankan pelanggan lebih mungkin untuk bersaing dengan layanan yang ditawarkan di sektor komersial, sehingga menawarkan pilihan kepada pelanggan. departemen publik dipilih untuk penelitian ini membebankan biaya kepada pelanggan untuk ketentuan layanannya, tetapi layanan ini tidak ditawarkan oleh sektor komersial lain dan dengan demikian tidak bersaing langsung dengan organisasi jasa lainnya [25]. Namun, pelanggan menuntut layanan yang lebih baik yang mereka bayar. Di sisi lain, itu juga bisa diperdebatkan bahwa layanan publik yang tidak dipungut biaya cenderung tidak mengadopsi praktik kualitas layanan kecuali: didorong oleh tuntutan pelanggan dan undang-undang pemerintah [26]. Kuesioner survei diisi sendiri oleh pelanggan, dengan bantuan yang tersedia jika diperlukan. Pengambilan sampel kenyamanan non-probabilitas digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Pelanggan yang meninggalkan departemen publik dicegat dan mereka yang bersedia untuk berpartisipasi dalam survei diberikan kuesioner untuk diisi. Akhirnya, selama minggu kedua dan ketiga Agustus 2021, ukuran sampel 250 ditargetkan dan 202 kuesioner dari pelanggan dinilai dapat digunakan untuk analisis data untuk penelitian ini, memberikan tingkat respons 81%. Selanjutnya, setelah berdiskusi dengan staf mengenai tujuan penelitian, FLE diberi kuesioner survei yang sama dengan pelanggan untuk penyelesaian sendiri secara individual [27]. Dari 30 PHK, 28 mengembalikan kuesioner yang telah diisi dan dapat digunakan sehingga menghasilkan tingkat respons sebesar 93%. Paket Statistik untuk Ilmu Sosial versi 14.0 digunakan untuk menganalisis data. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengukur skor ekspektasi dan persepsi responden. Analisis skor kesenjangan dilakukan, sehingga mengungkapkan masalah manajerial yang penting. Pada pelaksanaan PKM ini, pelaksana menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Camat Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan langsung berkoordinasi dengan masing-masing Desa untuk mengirimkan perwakilannya [28].

## 3. PEMBAHASAN

Proses pendampingan dilakukan oleh Tim Pelaksana Pelayanan, yang menganalisis apa saja yang dibutuhkan dalam pelayanan publik di berbagai desa dalam rangka membangun standar pelayanan publik. Pelayanan publik adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan tuntutan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas komoditas, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan. Di tingkat desa, penyelenggara layanan publik harus mengikuti prinsip-prinsip berikut (UU Nomor 25 Tahun 2009): kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, perlakuan setara atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Terlepas dari kenyataan bahwa pengertian pelayanan publik telah lahir, apa yang terjadi di hampir semua desa di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang belum dilaksanakan secara memadai. Konsep pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum dipahami dengan baik oleh perangkat desa. Akibatnya, kita tidak bisa menemukan peraturan pelayanan publik di setiap desa. Temuan terbaru, kantor kecamatan

Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang gagal menyusun dan menetapkan standar hukum pelayanan publik. Sudah mulai ditangani dalam hal penataan atau penataan ruang pelayanan, namun akan tetap menjadi persoalan jika standar pelayanan publik yang baik tidak segera disiapkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang pelayanan publik.



**Gambar 3. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan tuntutan pelayanan bagi seluruh warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penguasaan barang, jasa, dan/atau jasa administrasi yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Sementara itu, lembaga penyelenggara negara, perusahaan atau korporasi, lembaga otonom yang dibentuk oleh undang-undang untuk penyelenggaraan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang didirikan khusus untuk kegiatan pelayanan publik juga merupakan contoh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah Desa sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik juga wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan prinsip yang berlaku dan diatur oleh undang-undang, khususnya prinsip ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Namun, apa yang terjadi di hampir semua desa di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang belum juga terwujud. Konsep pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum dipahami dengan baik oleh perangkat desa. Akibatnya, kita tidak bisa menemukan peraturan pelayanan publik di setiap desa. Bahkan, kantor kecamatan Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang belum menyusun dan mengembangkan standar pelayanan publik sesuai dengan undang-undang, menurut temuan terbaru. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pencapaian pemerintah sebagai daerah yang mendapat penghargaan kualitas pelayanan tertinggi Ombudsman Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sesuai dengan teknik Pelaksana. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan tiga (tiga) langkah. Pelaksana mengevaluasi keadaan Pemerintah Desa di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang pada tahap pertama perencanaan yang memuat daftar kesulitan masyarakat. Berikut adalah beberapa permasalahan yang muncul: 1) Di pemerintahan kecamatan dan desa, standar pelayanan publik belum terstruktur dan ditetapkan; 2) Desa-desa di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan masyarakat belum mengetahui mekanisme penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik; dan 3) Buruknya kualitas pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Desa Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, tim pengusul menghasilkan dan menyusun bentuk program yang harus dilaksanakan berdasarkan temuan analisis. Pelaksana setuju untuk mengadakan lokakarya atau sesi pelatihan tentang cara membuat standar pelayanan publik. Langkah selanjutnya adalah mewujudkan rencana tersebut. Saat ini, surat izin pertama dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sedang dilaksanakan.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah:

Pemerintah Desa Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: Masyarakat belum memahami mekanisme penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik, rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Desa Pasar Kemis, Kecamatan Kabupaten Tangerang dari permasalahan yang ada ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya workshop pembuatan standar pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Desa Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, peserta workshop dapat membuat peraturan tentang Standar Pelayanan Publik yang mematuhi aturan dan mempraktikkannya di Pemerintah Desa masing-masing, Tingkat keberhasilan dalam program workshop ini adalah 100 persen, Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Program SERVQUAL telah dilaksanakan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, terbukti dari output masing-masing desa dalam mengembangkan Standar Pelayanan Publik.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Maharani, S. Aninda, and S. Millah, "Pembuatan Kartu Ujian Online Sebagai Pengabdian Perguruan Tinggi," *ADI Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 8–14, 2021.
- [2] R. D. Hadiwidjaja, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah Baitul Maal wat Tamwil," *J. Ilmu Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 289–312, 2017.
- [3] S. Purnama, R. Widayanti, P. Edastama, and A. R. S. Panjaitan, "Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Yang Terkena Dampak Ekonomi Selama Covid-19 di Garut," *ADI Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 67–72, 2021.
- [4] A. Firatmadi, "Pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan," *J. Bus. Stud.*, vol. 2, no. 2, pp. 80–105, 2017.
- [5] S. D. Riskiono and U. Reginal, "Sistem Informasi Pelayanan Jasa Tour Dan Travel Berbasis Web (Studi Kasus Smart Tour)," *J. Inf. Dan Komput.*, vol. 6, no. 2, pp. 51–62, 2018.
- [6] T. Ayuninggati, N. Lutfiani, and S. Millah, "CRM-Based E-Business Design (Customer Relationship Management) Case Study: Shoe Washing Service Company S-Neat-Kers," *Int. J. Cyber IT Serv. Manag.*, vol. 1, no. 2, pp. 216–225, 2021.
- [7] T. Ayuninggati, E. P. Harahap, and R. Junior, "Supply Chain Management, Certificate Management at the Transportation Layer Security in Charge of Security," *Blockchain Front. Technol.*, vol. 1, no. 01, pp. 1–12, 2021.
- [8] E. T. Farras, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pelaporan SPT Melalui E-filling (Pada WPOP di KPP Sukoharjo)," *ADI Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 8–18, 2021.
- [9] N. Nawindah, L. Fajarita, and R. Ujiandari, "Peningkatan Keterampilan Siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Melalui Pelatihan Penggunaan Microsoft Word," *ADI Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 12–18, 2022.
- [10] N. P. L. Santoso, Y. Durachman, S. Watini, and S. Millah, "Manajemen Kontrol Akses Berbasis Blockchain untuk Pendidikan Online Terdesentralisasi," *Technomedia J.*, vol. 6, no. 1 Agustus, pp. 111–123, 2021.
- [11] M. Kamil, Y. Muhtadi, B. M. Sentosa, and S. Millah, "Tindakan Operasionalisasi Pemahaman Sains dan Teknologi Terhadap Islam," *Alph. J. Wawasan Agama Risal. Islam. Teknol. dan Sos.*, vol. 1, no. 1, pp. 16–25, 2021.
- [12] Z. Fauziah, H. Latifah, X. Omar, A. Khoirunisa, and S. Millah, "Application of Blockchain Technology in Smart Contracts: A Systematic Literature Review," *Aptisi Trans. Technopreneursh.*, vol. 2, no. 2, pp. 160–166, 2020.
- [13] H. Nusantoro, P. A. Sunarya, N. P. L. Santoso, and S. Maulana, "Generation Smart Education Learning Process of Blockchain-Based in Universities," *Blockchain Front. Technol.*, vol. 1, no. 01, pp. 21–34, 2021.
- [14] L. Meria, Q. Aini, N. P. L. Santoso, U. Raharja, and S. Millah, "Management of Access Control for Decentralized Online Educations using Blockchain Technology," in *2021 Sixth International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, 2021, pp. 1–6.
- [15] S. Azizah, B. P. K. Bintoro, and R. D. Octavyra, "Determining Factors of Continuance Intention to Use QR Code Mobile Payment on Urban Millennials in Indonesia Empirical Study on Mobile Payment Funds," *ADI J. Recent Innov.*, vol. 3, no. 2, pp. 121–138, 2022.
- [16] U. Rahardja, Q. Aini, and S. Maulana, "Blockchain innovation: Current and future viewpoints for the travel industry," *IAIC Trans. Sustain. Digit. Innov.*, vol. 3, no. 1, pp. 8–17, 2021.
- [17] A. S. Al-Harrasi and A. H. Al-Badi, "The impact of social networking: A study of the influence of smartphones

- on college students.,” *Contemp. Issues Educ. Res.*, vol. 7, no. 2, pp. 129–136, 2014.
- [18] I. Amsyar, E. Christopher, A. Dithi, A. N. Khan, and S. Maulana, “The Challenge of Cryptocurrency in the Era of the Digital Revolution: A Review of Systematic Literature,” *Aptisi Trans. Technopreneursh.*, vol. 2, no. 2, pp. 153–159, 2020.
- [19] S. Purnama, Q. Aini, U. Rahardja, N. P. L. Santoso, and S. Millah, “Design of Educational Learning Management Cloud Process with Blockchain 4.0 based E-Portfolio,” *J. Educ. Technol.*, vol. 5, no. 4, pp. 628–635, 2021.
- [20] U. Rahardja, Q. Aini, F. P. Oganda, and V. T. Devana, “Secure Framework Based on Blockchain for E-Learning During COVID-19,” in *2021 9th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 2021, pp. 1–7.
- [21] I. T. M. Daeng, N. N. Mewengkang, and E. R. Kalesaran, “Penggunaan smartphone dalam menunjang aktivitas perkuliahan oleh mahasiswa fispol unsrat manado,” *Acta Diurna Komun.*, vol. 6, no. 1, 2017.
- [22] O. N. N. Magetsari, L. F. Noviana, and A. R. Ganani, “Penyuluhan Nilai Ekonomi Sampah Rumah Tangga Bagi Masyarakat Kelurahan Duri Selatan,” *ADI Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 31–38, 2022.
- [23] R. Salam, H. Nusantoro, T. Ayuninggati, V. T. Devana, and A. P. Candra, “Peran Serta Dalam Melaksanakan Pembagian Makanan di Wilayah Bsd City,” *ADI Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 62–66, 2021.
- [24] B. N. Bhakti, Y. Nurfaizal, and T. Anwar, “Analisis Komparasi Teknik Rendering Blender Render Dan Cycles Render Pada Video Animasi 3d Tentang Alat Pencernaan Manusia,” *Technomedia J.*, vol. 6, no. 2 Februari, pp. 188–196, 2022.
- [25] N. Nawindah and L. Fajarita, “Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pembuatan Blog Bagi Siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,” *ADI Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 87–90, 2020.
- [26] A. Hayati, “Workshop Penyusunan Soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) Berdasarkan Kisi-Kisi Ujian Nasional Matematika SD,” *ADI Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 56–63, 2022.
- [27] D. Aprilia and D. E. Susilo, “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *Technomedia J.*, vol. 6, no. 2 Februari, pp. 197–211, 2022.
- [28] N. H. Munthe, F. I. Hartanto, and D. A. Syampurna, “Implementasi Sistem Monitoring Laporan Kerja Praktek Lapangan Berbasis Web Pada SMK Citra Madani Kabupaten Tangerang,” *Technomedia J.*, vol. 6, no. 2 Februari, pp. 212–222, 2022.